

## **BAB IV**

### **PERAN KARTOSUWIRJO DALAM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM INDONESIA (1949-1962)**

#### **A. Perjuangan Kartosuwirjo Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia**

Ketika situasi perang Asia Pasifik mulai memburuk bagi pihak Jepang, mereka (Jepang) bersedia untuk memberi kepemilikan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia untuk usaha-usaha perjuangannya. Orang Indonesia kini diperkenankan membentuk organisasi bersenjata sendiri. Pertama, pada bulan Oktober 1943, terbentuknya PETA (Pembela Tanah Air) dan kemudian, pada akhir 1944 dibentuklah *Hizbullah* (Tentara Allah), dari Masyumi. Kedua, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan Indonesia “merdeka di kelak kemudian hari”. Dan pada 1 Maret 1945 janji ini diulang, kali ini oleh panglima tertinggi Jepang, yang sekaligus mengumumkan pembentukan “Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan.” Berkat dibukanya kran kebebasan berupa konsesi dari pemerintah Jepang. Pada bulan Februari 1945, berkumpul sukarelawan *Hizbullah* di tempat pendidikan mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar militer selama tiga bulan, setelah itu mereka ditugaskan untuk kembali ke tempat masing-masing guna mengajarkan ilmunya kepada anggota yang baru. Hal inilah yang sejak lama ditunggu oleh Kartosuwirjo, bahwa rakyat Indonesia sangat berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.

Dia segera mengaktifkan kembali perguruan *Suffah* yang ada di Malangbong untuk melatih para pemuda berupa latihan kemiliteran.<sup>1</sup>

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat, dan dengan demikian menghadapkan para pemimpin Indonesia pada suatu masalah yang berat. Soekarno masih juga percaya dengan serangkaian kompromi politik ketimbang mendekati dirinya padan rakyat. Hanya Kartosuwirjo sajalah yang mensosialisasikan tentang konsep Indonesia merdeka secara Islam dikalangan nasionalis Islam di tengah-tengah kekosongan politik dan kekuasaan. Sebenarnya, sebelum hari-hari menjelang proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1946, Kartosuwirjo telah lebih dulu menebar aroma deklarasi kemerdekaan Islam. Kartosuwirjo mula-mula memproklamasikan Negara Islam pada 14 Agustus 1945, tetapi kemudian memberikan dukungannya kepada Republik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta.<sup>2</sup> Hal itu dilakukan oleh Kartosuwirjo untuk menunggu saat yang paling tepat untuk menghimpun dukungan besar bagi perjuangannya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Kartosuwirjo mempergunakan kebanyakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan kemiliteran setempat dan keterlibatan dalam politik partai Islam.

---

<sup>1</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru)*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), 57.

<sup>2</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, (Kasus Darul Islam Jawa Barat)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), 18.

Awal bulan Oktober 1945 Kartosuwirjo turut dalam pembicaraan antara anggota-anggota Masyumi di Surabaya, tentang rencana untuk mengubah Masyumi menjadi sebuah partai politik. Yang hadir pada pembicaraan ini selain Kartosuwirjo juga Wahid Hasyim dan Moh. Natsir. Ketika tidak dapat dicapai kata sepakat tentang nama yang baru untuk partai itu, maka partai Masyumi didirikan sebagai sebuah partai politik yang baru pada tanggal 7-11-1945 di Yogyakarta dengan nama yang lama.<sup>3</sup> Masyumi yang baru ini dimaksudkan agar menjadi partai politik kesatuan bagi semua Muslim, tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, pendidikan dan ekonomi.<sup>4</sup>

Partai politik Islam baru tersebut yang diketuai oleh Hasyim Asy'ari mengadakan kongres pertama kali di Yogyakarta, pada kongres tersebut ditetapkan bahwa di samping *Hizbullah*, yaitu sebuah laskar Islam yang masih tetap berdiri, dibentuk lagi sebuah laskar yang dinamakan *Sabilillah*. Berbeda dengan *Hizbullah* yang anggotanya masih sangat muda, anggota *Sabilillah* terdiri dari generasi yang lebih tua. Keputusan lainnya adalah, bahwa umat Islam harus dipersiapkan untuk menjalankan jihad. Dalam programnya, Masyumi merumuskan tujuannya, yaitu untuk menciptakan sebuah negara hukum berdasarkan ajaran agama Islam.<sup>5</sup> Kemudian anggota Masyumi mendirikan kantor-kantor cabang partai tersebut mulai dari tingkat provinsi hingga ke bawah yaitu tingkat desa. Karena itu Kartosuwirjo

---

<sup>3</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 54.

<sup>4</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 72.

<sup>5</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 55.

mengadakan perjalanan ke Jawa Barat untuk mempersiapkan pendirian kantor pusat Masyumi di daerah Priangan. Kantor pusat ini mula-mula dipimpin oleh K. Zainuddin tetapi pada akhir tahun itu badan pengurus dibubarkan.

Pada bulan juni 1946, Masyumi daerah Priangan mengadakan konferensi di kota Garut, untuk memilih pengurus yang baru. Dalam konferensi tersebut Kartosuwirjo menunjuk K. H. Muchtar sebagai ketua umum dan dia sendiri menjadi wakil ketua. Sanusi Partawijaya menjadi sekretaris badan pengurus, Isa Anshari dan K. H. Toha memimpin bidang ekonomi, Kamran sebagai pemimpin *Sabilillah*. Dalam konferensi tersebut Kartosuwirjo menyampaikan pidato tentang haluan politik Islam yang berisi pertanyaan mengenai siapa yang akan berkuasa di Indonesia. Dengan memahami dirinya kepada ajaran Islam yang *hanif*, Kartosuwirjo menganjurkan persatuan dalam cita-cita perjuangan. Ia memperingatkan para pendengarnya yang sekaligus merupakan pendukungnya, bahwa konflik antara sesama bangsa Indonesia hanyalah akan menguntungkan Belanda, dan ia mendesak menghentikan perbedaan-perbedaan ideologi. Segera setelah tercapai kemerdekaan penuh, perbedaan-perbedaan ini dapat dicari penyelesaiannya secara demokratis, menurut kedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

Sementara itu di *Institut Suffah* yang berada di Malangbong sampai saat itu laskar *Hizbullah* mendapatkan latihan kemiliteran dari Ateng Jaelani, seorang perwira PETA yang dahulu. Dengan perhitungan politiknya, Kartosuwirjo meramalkan akan

---

<sup>6</sup> Al- Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 66.

terjadi perjuangan bersenjata. Karena itu Kartosuwirjo bolak-balik antara Yogyakarta dan Jawa Barat untuk meyakinkan masyarakat akan kemungkinan meletusnya perang.

Tidak lama setelah PETA, *Heiho*, dan *Seinendan* dan kesatuan Indonesia yang lainnya dilucuti dan dibubarkan oleh Jepang, pemimpin-pemimpin organisasi tersebut selain mendirikan BKR (Badan Keamanan Rakyat) juga mendirikan berbagai laskar atau Badan Perjuangan dengan bermacam-macam ikatan etnis, politik dan keagamaan. Dengan demikian, di daerah Bandung dan Priangan saja terbentuk 18 laskar besar. Tetapi terdapat masalah yang dihadapi oleh laskar-laskar itu adalah kurangnya pengadaan senjata, karena di daerah Bandung, rakyat kurang berhasil dalam merampas senjata dari tentara Jepang. Untuk mencapai koordinasi yang lebih baik dari laskar-laskar tersebut, maka pada tanggal 15 September 1946 di dirikan di Bandung Markas Daerah Pertahanan Priangan (MDPP). Dengan anggotanya para *Hizbullah* di bawah pimpinan Zainal Abidin, Kadar Solihat, dan Kamran, juga laskar *Sabilillah* di bawah pimpinan politikus Masyumi diantaranya Isa Anshari, Ajengan Toha, Kiai Jusuf Taujiri, yang dulu bersama-sama dengan Kartosuwirjo mendirikan KPK-PSII.<sup>7</sup>

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, Kartosuwirjo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Dalam sidang tersebut dibahas apakah persetujuan Linggarjati yang telah

---

<sup>7</sup> Ibid., 67.

ditandatangani oleh pemerintah Republik dan Belanda pada bulan Nopember 1946 akan disetujui atau tidak. Kepergian Kartosuwirjo disertai para pejuang *Hizbullah* Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung antara laskar sayap kiri (diwakili partai Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia)), yang menginginkan disetujui hasil perundingan tersebut dengan laskar *Hizbullah* (diwakili partai Masyumi dan PNI), yang hampir semua wakilnya tidak menyetujui hasil perundingan.<sup>8</sup> Kartosuwirjo merupakan anggota Masyumi yang menolak perjanjian Linggarjati tersebut tanpa kompromi. Karena, nampak jelas bahwa dengan di setujuinya perjanjian Linggarjati maka akan sangat menguntungkan pihak Belanda dalam usahanya untuk menjajah kembali Indonesia. Ketika anggota KNIP yang menolak perjanjian Linggarjati diancam oleh partai Perindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada Kartosuwirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.<sup>9</sup> Pada tahun 1947 perjuangan politik umat Islam benar-benar ditekan, karena kekuatan militer secara keseluruhan berada di tangan kelompok sayap kiri, yaitu PKI dan kaum Sosialis.<sup>10</sup>

Hal tersebut di atas terbukti ketika Amir Syarifudin menjabat sebagai menteri pertahanan dan dia mengharuskan setiap laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas untuk masuk ke dalam Inspektorat Perjuangan yang di koordinir kubu komunis, namun usaha yang dilakukan oleh Amir Syarifudin ditentang oleh R. Oni selaku ketua

---

<sup>8</sup> Ibid., 67.

<sup>9</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 39.

<sup>10</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 59.

*Sabilillah* di daerah Priangan yang dilantik pada bulan April 1947, ia menilai bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Amir Syarifudin tersebut mempunyai tujuan untuk membuat umat Islam menjadi Sosialis.<sup>11</sup> Dan alasan lain bahwa semua tentara Republik adalah anggota sayap kiri. Maka kemungkinan *Sabilillah* dan *Hizbullah* diterima masuk TNI sangat tipis, dan di khawatirkan bahwa, TNI hanya akan mengambil senjatanya saja dari kedua laskar tersebut, selanjutnya mereka segera dipulangkan ketempat masing-masing.<sup>12</sup>

Sekitar bulan Mei 1947, pihak Belanda sudah memutuskan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Biaya pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur karena perang. Apabila mereka ingin mempertahankan pasukan ini, maka pihak Belanda memerlukan komoditas dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet). Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 59.

<sup>12</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 67.

<sup>13</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 473.

Pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati<sup>14</sup> yang mengakui Republik sebagai penguasa *de facto* di Jawa, Madura dan Sumatera. Belanda memang tidak akan pernah berniat untuk memenuhi perjanjian itu, mereka hanya ingin membodohi pemerintah Republik agar belanda bisa mengulur waktu guna untuk memperkuat pasukannya untuk menyerang Indonesia kembali.

Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Syahrir dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Juli 1947, karena sebelumnya dia sangat menyetujui perjanjian tersebut. Setelah Agresi Militer 1 pada bulan juli, Amir Syarifudin menggantikan kedudukan Syahrir sebagai perdana menteri yang sebelumnya ia menjabat sebagai menteri pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, dia menggaet anggota PSII untuk duduk dalam kabinetnya, termasuk menawarkannya kepada Kartosuwirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi wakil menteri pertahanan kedua. Dan jawaban Kartosuwirjo seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena “ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada masyumi”.<sup>15</sup>

Kartosuwirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat yang sudah keruh karena semakin menjadi-jadinya

---

<sup>14</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 39.

<sup>15</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 68.

petualangan para politikus komunis, dan ketidak mampuan Soekarno dalam mengatasi setiap masalah yang ditimbulkan Belanda. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia yang disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan antara pemerintah RI dengan Belanda, disamping itu Kartosuwirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang sangat ke kiri-kirian. Hal itu terlihat jelas dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi perdana menteri merangkap menteri pertahanan.<sup>16</sup>

Kecewa akibat politik Masyumi dewasa itu Kartosuwirjo pun kembali ke Malangbong. Dia tetap menjabat sebagai sekretaris pertama partai, tetapi sekarang dia diangkat pula sebagai wakilnya untuk Jawa Barat. Dalam jabatannya yang terakhir ini dia mulai menyusun kembali pasukan gerilya Islam di daerah ini. Pada tahun 1947 ia mendirikan Dewan Pertahanan Umat Islam di Garut dan Majelis Umat Islam Indonesia di Tasikmalaya atas nama Masyumi. Kedua organisasi ini direncanakan untuk memperdalam dan mengkoordinasikan perjuangan masyarakat Islam setempat untuk melawan Belanda.<sup>17</sup>

Pada tanggal 20 juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan “aksi polisional” mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), serta dari Surabaya

---

<sup>16</sup> Ibid., 68.

<sup>17</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 74-75.

untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Melihat keberhasilan dalam aksi ini, beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook ingin melanjutkan aksinya merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai “aksi polisional” tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap republik.<sup>18</sup> Pada tanggal 14 Agustus 1947 Kartosuwirjo mengumumkan jihad terhadap Belanda yang terus mendesak maju.<sup>19</sup>

## **B. Perjuangan Kartosuwirjo dalam Memproklamasikan Negara Islam**

### **Indonesia**

Pada tanggal 19 Januari 1948 atas prakarsa pihak sekutu diadakanlah suatu persetujuan bersama antara pemerintah Republik dengan Belanda di atas kapal Amerika *USS Renville* dipelabuhan Jakarta,<sup>20</sup> dengan penandatanganan persetujuan Renville oleh ketua delegasi masing-masing, yaitu Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo atas nama pemerintah kerajaan Belanda dan Mr. Syarifuddin atas

---

<sup>18</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, 473-474.

<sup>19</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional*, 19.

<sup>20</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 69.

nama pemerintah Indonesia.<sup>21</sup> Salah satu isi perjanjian itu menyatakan bahwa TNI harus mengosongkan kantung-kantung gerilya yang tersebar di wilayah pendudukan Belanda. Pengosongan ini kemudian dikenal sebagai “hijrah”, istilah yang pernah dipakai PSII dan didukung oleh Kartosuwirjo. Namun, ia tidak mau melaksanakan “hijrah” fersi pemerintah RI tersebut. Karena menurutnya pemerintah RI dan TNI sebenarnya tidak “hijrah” melainkan “lari”.<sup>22</sup> Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik dengan menyetujui perjanjian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu mengadakan perundingan dalam mempertahankan makna kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.

Dengan hasil diadakannya perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Amir Syarifudin. Anggota-anggota TNI dan Masyumi dalam kabinetnya meletakkan jabatannya ketika persetujuan Renville ditandatangani, dan kemudian Amir Syarifudin meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri pada 23 Januari 1948. Dia mungkin mengharapkan tampilnya kabinet baru yang beraliran kiri untuk menggantikannya, tetapi Soekarno berpaling ke arah lain. Dia menunjuk Hatta untuk memimpin suatu “kabinet presidentil” darurat (1948-1949), yang bukan bertanggung jawab kepada KNIP melainkan kepada Soekarno sebagai presiden. Para anggota kabinet Hatta rata-rata berasal dari golongan tengah, terutama terdiri atas orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan sayap kiri kini

---

<sup>21</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional (dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan)* jilid II, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 128.

<sup>22</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 40.

menjadi pihak oposisi. Para pengikut Syahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan jalan membentuk partai tersendiri, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948 dan memberikan dukungan mereka kepada pemerintahan Hatta.<sup>23</sup>

Pada bulan Februari 1948 koalisi sayap kiri di bawah pimpinan Amir Syarifuddin yang berada diluar pemerintahan Republik ini memulai suatu usaha baru dengan menimbulkan bencana untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Dengan mengubah nama baru menjadi *Front Demokrasi Rakyat* (FDR) mencela persetujuan Renville yang sebetulnya dulu dirundingkan pada masa pemerintahannya. Front tersebut berusaha membentuk organisasi-organisasi petani dan buruh, tetapi usaha itu hanya meraih sedikit keberhasilan.<sup>24</sup> Sementara itu pihak Belanda terus bergerak maju untuk membentuk negara-negara federal di wilayah-wilayah yang telah direbutnya. Belanda telah merebut semua pelabuhan penting di Jawa serta daerah-daerah sumber hasil bumi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Situasi yang kacau pada saat itu membuat Kartosuwirjo lebih memfokuskan perjuangannya. Dalam suatu rapat Masyumi di Garut, yang dipimpin Kartosuwirjo sendiri dan di mana semua organisasi yang bergabung di Masyumi harus mengirimkan wakilnya, dalam rapat tersebut diputuskan, bahwa Masyumi cabang Garut diganti namanya menjadi *Dewan Pertahanan Oemat Islam* (DPOI). Anggaran dasar dan

---

<sup>23</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, 475.

<sup>24</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 70.

anggaran rumah tangga DPOI sama seperti anggaran dasar Masyumi, hanya ditambahkan sebuah pasal baru yang berhubungan dengan pertahanan melawan tentara Belanda. Sebelum pembentukan DPOI di Garut, juga sudah dibentuk dua *Madjlis Pertahanan Oemmat Islam* (MPOI) di Tasikmalaya dan di Ciamis. Untuk masalah pertahanan *Sabilillah* di bawah pimpinan R. Oni ditempatkan di bawah komando MPOI dan DPOI.<sup>25</sup>

Akibat persetujuan perjanjian Renville maka pasukan yang ada di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda harus ditarik mundur ke Jawa Tengah. Dengan demikian sekitar 29000 tentara Divisi Siliwangi dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Tetapi satuan gerilyawan *Hizbullah* dan *Sabilillah* menolak untuk mematuhi dan memilih untuk bertahan. Di antara satuan-satuan *Hizbullah* yang tetap tinggal, yaitu mereka yang dipimpin oleh Zainal Abidin di daerah Baluburlimbangan dan Ateng Kurnia yang beroperasi sekitar Cicalengka, serta di Cirebon di bawah pimpinan Agus Abdullah Sukunsari. Sedangkan satuan-satuan *Sabilillah* yang tetap tinggal berada di bawah pimpinan Enokh di daerah Wanaraja dan Garut, dan oleh Oni di sekitar gunung Cupu, sebelah utara Tasikmalaya, dan satu Batalyon lengkap untuk bergerilya di daerah Bandung Selatan, yaitu Batalyon 22 Jaya Pangrengot di bawah pimpinan Sugih Arto.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 71.

<sup>26</sup> Ibid., 71.

Pada tanggal 30 Januari 1948, R. Oni berangkat ke Peuteuyunggal dekat Garut untuk berunding dengan Kartosuwirjo tentang akibat dari perjanjian Renville. Saat itu Kartosuwirjo memakai nama “kalipaksi”. Keduanya sepakat bahwa pasukan Islam agar tetap tinggal di Jawa Barat untuk melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan rakyat untuk melawan Belanda. Dampaknya Tentara Islam pecah, diizinkan Oleh Kartosuwirjo untuk memihak Tentara Nasional Indonesia,<sup>27</sup> tetapi pasukan yang mengundurkan diri atau yang memihak kepada Tentara Nasional Indonesia harus dilucuti senjatanya dengan damai atau dengan dipaksa. Keputusan penting lainnya adalah akan diadakan sebuah konferensi di Pangwedusan di dekat Cisayong pada 10 Februari dan harus dihadiri oleh semua pimpinan Islam daerah Priangan.<sup>28</sup>

Pada tanggal 10 Januari 1948 telah berkumpul 160 wakil-wakil organisasi Islam di Pangwedusan untuk mengadakan sebuah konferensi yang akan berlangsung dua hari. Di antara mereka hadir Kartosuwirjo sebagai wakil Pengurus Besar Masyumi untuk Jawa Barat, Kamran sebagai Komandan Territorial *Sabilillah*, Sanusi Partawijaya sebagai ketua Masyumi daerah Priangan, Dahlan Lukman sebagai ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Siti Murtadji'ah sebagai ketua Putri GPII, dan Abdullah Ridwan sebagai ketua *Hizbullah* untuk Priangan. Sebagai ketua Masyumi cabang Garut hadir Saifullah yang beberapa waktu kemudian ditawan oleh pasukan Belanda, begitu juga 4 ketua DPOI yang lain. Dari Bandung dan Sumedang

---

<sup>27</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2 (Buku yang Akan Menuntaskan Kepenasaran Anda akan Kebenaran Sejarah Indonesia)*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2010), 188.

<sup>28</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 64.

hadir juga masing-masing dua utusan dari cabang DPOI, selain itu hadir juga dari Tasikmalaya dan Ciamis 3 orang anggota MPOI.<sup>29</sup>

Keputusan penting yang diambil dalam konferensi Cisayong adalah membekukan Masyumi di Jawa Barat, membentuk pemerintah daerah dasar di Jawa Barat, dan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam pemerintah dasar Jawa Barat yang diusulkan ini Majelis Islam atau kadang-kadang disebut juga Majelis Umat Islam, dan organisasi-organisasi Islam yang ada harus bergabung. Ini akan menggantikan kedua Majelis Islam yang telah ada, yang didirikan di Garut dan Tasikmalaya pada tahun sebelumnya. Ketua Majelis Islam ini adalah Kartosuwirjo yang juga bertanggung jawab dalam masalah pertahanan. Beberapa hari sesudah konferensi Cisayong, dilangsungkan suatu pertemuan lain dengan tujuan memberikan bentuk yang konkrit kepada Tentara Islam Indonesia. Tidak hanya dibentuk Tentara Islam Indonesia yang sebenarnya, tetapi juga sejumlah korps khusus seperti BARIS (Barisan Rakyat Islam) dan PADI (Pahlawan Darul Islam) juga diadakan. Markas besarnya didirikan di Gunung Cupu, pangkalan pasukan *Sabililah* yang dipimpin Oni.<sup>30</sup> Seminggu setelah konferensi terjadi pertempuran pertama dengan pihak Belanda, dan peristiwa ini disebut sebagai “Hari Angkatan Senjata”. Pertempuran dengan Belanda masih terus berlangsung hingga akhir April 1948. Ketika pasukan TII meninggalkan daerah kantong gerilya awal Mei dan memencar di daerah

---

<sup>29</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 72.

<sup>30</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 77.

Tasikmalaya, Ciamis, Garut dan Indihiang, dimana di daerah tersebut telah diduduki tentara Belanda, dan mulai diserang kembali oleh TII.

Pada tanggal 1-2 Maret berlangsung suatu konferensi penting yang kedua di Cipeundeuy, Banturujeg di daerah Cirebon yang dihadiri oleh semua pimpinan cabang-cabang Masyumi daerah Jawa Barat seperti dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, dan juga para komandan TII. Disini dikukuhkan keputusan-keputusan yang telah dicapai di Pangwedusan, sedangkan selanjutnya ditekankan perlunya bersiap menciptakan suatu Negara Islam. Hal ini dianggap perlu agar siap siaga sekiranya Belanda melanjutkan rencananya menciptakan Negara Pasundan yang merdeka di Jawa Barat, atau bila pemerintah republik harus bubar.<sup>31</sup> Sehingga pada pertemuan tersebut Kartosuwirjo diangkat menjadi Imam di Jawa Barat.

Kartosuwirjo beserta umat Islam tetap berharap untuk dapat merealisasikan cita-citanya untuk mendirikan Negara Islam secara legal, meskipun belum di proklamasikan secara terang-terangan, namun rencana itu tidak pernah lenyap dari umat Islam Jawa Barat untuk mempersiapkan kelahirannya. Struktur pemerintah yang disusun oleh Kartosuwirjo dan Oni, jelas dimaksudkan sebagai sebuah pemerintah Islam yang akan menggantikan pemerintah Republik Indonesia jika kalah dalam perang melawan Belanda.

Pada tanggal 1-5 Mei 1948 diselenggarakan konferensi yang ketiga di Cijoho. Hasil terpenting yang diputuskan dalam rapat tersebut adalah perubahan nama

---

<sup>31</sup> Ibid., 78.

Majelis Islam Pusat menjadi Majelis Imamah di bawah pimpinan Kartosuwirjo sebagai Imam. Majelis Imamah itu terdiri dari lima “kementerian” yang dipimpin oleh masing-masing ketua Majelis. Majelis tersebut adalah:

1. Majelis Penerangan yang dipimpin oleh Toha Arsyad
2. Majelis Keuangan yang dipimpin oleh Sanusi Partawijaya
3. Majelis Kehakiman yang dipimpin oleh K. H. Ghazali Thusi
4. Majelis Pertahanan yang dipimpin oleh S. M. Kartosuwirjo
5. Majelis Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sanusi Partawijaya<sup>32</sup>

Anggota Majelis Imamah adalah Kamran sebagai komandan Divisi TII, Syarif Hidayat dan R. Oni sebagai Komandan Resimen Sunan Rachmat, di samping itu dibentuk pula Majelis Fatwa yang dipimpin oleh seorang Mufti Besar, dan anggota-anggotanya terdiri dari para mufti. Tugas majelis Fatwa ini sebagai penasehat Imam. Keputusan penting lainnya adalah mendirikan dan menguasai satu “Ibu Daerah Negara Islam”, yaitu suatu daerah dimana berlaku “kekuasaan dan hukum-hukum agama Islam”, yang mana daerah ini dinamakan Daerah I (D-I), daerah di luar Daerah I dibagi-bagi menjadi Daerah II (D-II) yaitu daerah dimana hanya sebagian saja yang dikuasai oleh umat Islam dan Daerah III (D-III) yaitu daerah yang masih dikuasai oleh pihak bukan Islam (Belanda).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 57-58.

<sup>33</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 75.

Kartosuwirjo yakin bahwa perjanjian Renville akan dilanggar oleh Belanda. Keyakinan tersebut terbukti ketika pada 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer II. Ibukota Yogyakarta direbut Belanda, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan, demikian juga beberapa anggota kabinet.<sup>34</sup> Melihat situasi tidak menentu ini, pada tanggal 20 Desember 1948 umat Islam bangsa Indonesia di bawah komando Kartosuwirjo mengumandangkan perang suci melawan Belanda.

Perang suci yang dikobarkan oleh Kartosuwirjo ini diilhami oleh firman Allah:

*“Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka ialah neraka jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya”.* (QS. At-Taubah: 73)<sup>35</sup>

Dengan diilhami oleh ayat-ayat inilah, Tentara Islam Indonesia di bawah komando Kartosuwirjo menyerukan *jihad fi sabilillah* untuk memerangi Belanda dan Negara Islam Indonesia dapat didirikan. Dengan komando sebagai berikut:

1. Diperintahkan kepada seleroeh lapisan Oemmat Islam Bangsa Indoensia, oentoek moelai melakoekan perang Soetji Moethlak, Perang Totaliter itoe, hingga pendjadjahan hilang moesnah sama sekali. Dan
2. Diperintahkan kepada seleroeh Angkatan Perang Negara Islam Indonesia, oentoek mempelopori dan membantoe ra'iat, hingga revolusi Islam selesai dan Negara Islam Indonesia berdiri dengan sempoernanja, di seleroeh Indonesia.<sup>36</sup>

Madinah, 19 Safar 1368  
20 Desember 1948

Pemerintah Negara Islam Indonesia

---

<sup>34</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 41.

<sup>35</sup> Kholid O. Santoso, *Jejak-Jejak Sang Petualang*, 93.

<sup>36</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 83.

Imam:  
S. M. kartosuwirjo

Dengan berakhirnya Republik di Yogyakarta, dan dengan dikibarkannya bendera putih di karesidenan Yogyakarta, sebenarnya telah terdapat fakum kekuasaan, yang oleh Kartosuwirjo dipandang sebagai saat yang tepat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Namun dia masih tetap mencoba untuk memperoleh pimpinan komando tertinggi secara legal. Dan Kartosuwirjo sendiri telah menyatakan bahwa perjuangannya adalah lanjutan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Dan dia berharap agar Negara Islam Indonesia yang sudah dia bentuk akhirnya akan dilegalisir meskipun tanpa proklamasi.

Setelah perjanjian Renville dilanggar oleh pihak Belanda, Divisi Siliwangi yang telah mengungsi diperintahkan untuk kembali ke Jawa Barat yang di sebut dengan “*Long March*”. “*Long March*” ini dianggap sebagai *hijrah* agar dipandang Islami semua tindakan mundur tentara Siliwangi ini. Padahal mereka bukan ber-*hijrah*, mereka sesungguhnya *kabur* dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Mereka dianjurkan untuk bersama-sama bergabung dengan Tentara Islam Indonesia untuk mempertahankan daerah Jawa Barat dari ancaman militer Belanda dan negara bonekanya yaitu Negara Pasundan.

Semua usaha dari TII yang mencoba untuk mengarahkan ke arah kerja sama melawan Belanda mengalami kegagalan. Kepada kesatuan TNI diberitahukan bahwa mereka sebaiknya menempatkan diri di bawah komando Tentara Islam Indonesia.

Dan diberitahukan pula bahwa semenjak *kaburnya* mereka ke Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan perjanjian Renville, sesungguhnya yang memperjuangkan Jawa Barat adalah Tentara Islam Indonesia bersama-sama dengan rakyat Jawa Barat bahu membahu melaksakan wajib sucinya mempertahankan bumi Indonesia dari kekerasan dan kedzaliman tentara Belanda. Karena kesatuan TNI tidak mau bergabung dengan TII maka terjadilah peristiwa yang dicatat sebagai awal dari pertikaian yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 1949 di Antralina. Kejadian ini sekaligus merupakan awal dari permusuhan antara TII dengan TNI dan Belanda yang oleh Kartosuwirjo disebut dengan “Perang Segi Tiga Pertama di Indonesia”.<sup>37</sup>

Kartosuwirjo menyatakan dalam maklumatnya, bahwa kesatuan TNI yang kembali dari Jawa Barat, dan yang dia sebut sebagai “tentara liar” tidak pandai menghargai dirinya sebagai tamu, melainkan ingin menguasai daerah dan rakyat Negara Islam Indonesia. Menurut Kartosuwirjo, “Waktu mereka (ja’ni R.I dlorurot dan komunis gadungan) itu masuk di daerah de facto Majelis Islam, maka dengan sombong dan tjongkaknya mereka mengindjak-indjak hak dan memperkosa keadilan “tuan rumah”, sehingga terjadilah insiden pertama dengan menggunakan sendjata, jang terkenal dengan nama “Pertempuran Antralina”. Dia juga mewajibkan seluruh anggota TII, PADI, BKN dan organisasi *Negara Islam Indonesia* yang lainnya untuk

---

<sup>37</sup> Lihat S. M. Kartosuwirjo (Karma Yoga) dalam Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 84.

memperlakukan tentara liar, gerombolan serta golongan lain yang ada di Jawa Barat sesuai dengan hukum Islam di masa perang.<sup>38</sup>

Menurut Kartosuwirjo di Jawa Barat sejak didirikannya Negara Islam tahun 1948 hanya terdapat dua golongan yang saling mengadu kekuatan, yaitu Belanda dan Negara Islam Indonesia, semua golongan-golongan lainnya tidak diizinkan untuk menduduki sebuah daerah di Jawa Barat. Bila kesatuan-kesatuan tersebut memberikan perlawanan pada waktu mereka dilucuti, maka mereka dianggap sebagai musuh Negara Islam Indonesia dan musuh Islam.<sup>39</sup> Termasuk juga Divisi Siliwangi yang ia anggap telah menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Oleh karena itu kesatuan ini tidak lagi punya hak untuk menduduki kembali daerah Jawa Barat.

Ketika tekanan internasional datang, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada 7 Mei 1949, ditandatangani perjanjian *Roem-Royen*. Dalam perjanjian tersebut Belanda menjanjikan untuk mendirikan kembali Pemerintahan Republik Indonesia dan menghentikan semua permusuhan. Sebaliknya, pihak Indonesia harus dapat menghentikan semua aksi gerilyanya terutama aksi yang dilakukan oleh gerakan

---

<sup>38</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 87.

<sup>39</sup> *Salinan Pedoman Dharma Bhakti 1...*, maklumat Militer No 1, lihat Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 87.

Darul Islam. Dan harus bersedia pula mengikuti Konferensi Meja Bundar untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.<sup>40</sup>

Kartosuwirjo yang memang tidak pernah setuju dengan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah RI seperti kedua perjanjian sebelumnya, ia juga menolak hasil perjanjian *Roem Royen*. Kartosuwirjo yakin bahwa dengan menyerahkan kedaulatan dari tangan Belanda, Republik Indonesia Serikat menjadi sebuah Negara atas belas kasihan Belanda. Kartosuwirjo kini memisahkan diri dari Masyumi yang turut berpartisipasi dalam perundingan yang sedang berlangsung itu dan dia mencap sikap para politisi seperti Hatta dan Moh. Roem sangat memalukan: “Roem dan Hatta jang dewasa achir-achir ini memang sudah tidak tahu malu lagi, mendjual negara sampai habis, obral besar-besaran. Atau: sungguh memalukan sekali” baginya kini Indonesia kembali kepada derajat sebelum proklamasi, yaitu “derajat nul besar.”<sup>41</sup>

Pada tanggal 4 Agustus 1949 disusun delegasi Indonesia yang akan mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda di Den Haag selama Konferensi Meja Bundar. Kira-kira pada waktu yang bersamaan Moh. Natsir, yang dalam kabinet sebelumnya menjabat sebagai Menteri Penerangan, ditugaskan oleh Moh. Hatta untuk mengadakan hubungan dengan Kartosuwirjo, agar Kartosuwirjo menghentikan semua permusuhan terhadap angkatan bersenjata Republik. Dengan berangkatnya Hatta ke Den Haag pada tanggal 6 Agustus, ini bagi Kartosuwirjo merupakan pertanda untuk

---

<sup>40</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 86.

<sup>41</sup> *Salinan Pedhoman Dharma Bhakti II*, lihat Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 91.

bertindak, karena dengan keberangkatan Hatta ke Den Haag baginya kini terdapat “fakum Kekuasaan”.

Dengan penuh perjuangan akhirnya Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949, di kampung Cisampang, desa Cidugaleuin, kecamatan Leuwisari Tasikmalaya, yang dihadiri oleh anggota Komandemen Tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu. Dalam surat jawaban Kartosuwirjo kepada Natsir yang terdiri dari beberapa baris, Kartosuwirjo menerangkan, bahwa sayang sekali tiga hari sebelumnya dia telah memproklamasikan Negara Islam Indonesia, dan kini proklamasi itu tidak dapat ditarik kembali. Dan menyatakan kata-kata itu dalam gayanya yang khas: “Saya tidak mau menelan air ludah saya kembali”.<sup>42</sup>

Menurut suatu pendapat yang tersebar luas di Indonesia, terdapat kerjasama antara APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dibentuk oleh Westerling bekas komandan kesatuan istimewa Belanda dengan gerakan Darul Islam-Kartosuwirjo, bahkan diduga keras bahwa kedua orang tersebut pernah bertemu di hotel Preanger di Bandung. Menurut anggapan itu terdapat semacam perjanjian antara APRA dan gerakan Darul Islam, bahwa pada waktu APRA menyerang Bandung, gerakan DI akan menyerang kota itu juga apabila gerakan itu berhasil, kota Bandung akan dijadikan basis dan ibu-kota gerakan Darul Islam. Tetapi kebenaran berita itu tidak pernah dapat dibuktikan. Kartosuwirjo sendiri selalu membantah, bahwa dia pernah

---

<sup>42</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 94.

bertemu dengan Westerling atau orang Belanda lainnya. Ini telah dinyatakan dalam satu Maklumat NII pada waktu disidangkannya perkara Jungschlager pada tahun 1957.<sup>43</sup>

Perjuangan Kartosuwirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sangatlah panjang dan berat. Meskipun perjuangan tersebut disebut sebagai sebuah “pemberontakan”, tetapi itu merupakan pemberontakan yang tidak biasa, ia merupakan sebuah perjuangan suci untuk memerangi kedzaliman. Pemberontakan ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pemberontakan yang bersifat regional, bukan pula pemberontakan yang muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya. Melainkan pemberontakan karena cita-cita yang diilhami oleh ajaran Islam yang lurus.

Lahirnya Negara Islam Indonesia sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia dalam hal ini adalah Kartosuwirjo, melainkan *af'alullah* yaitu perbuatan serta program langsung dari Allah SWT. Pada saat proklamasi Negara Islam Indonesia diikrarkan, sesungguhnya sejak saat itu umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, telah memperoleh kemerdekaan secara hakiki. Mereka telah memilih negara dan juga pemerintahan yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar negara. Jika setiap Muslimin di negara ini tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam dan tidak pula diperintah oleh aturan serta undang-undang Islam, maka pada hakikatnya mereka belum merdeka. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk

---

<sup>43</sup> Ibid., 125.

memperjuangkan kemerdekaan yang bebas dari segala bentuk belenggu jahiliyah demi kemanusiaan, keadilan, serta kebebasan melaksanakan syari'at Islam.

Yang paling dibutuhkan untuk dakwah Islam di Zaman sekarang ini adalah, mendirikan *Dar Islam* atau Negara Islam yang mengadopsi risalah Islam baik akidah dan undang-undang, ibadah dan akhlak, cara hidup dan kebudayaan. Yang bisa menjalankan baik secara materi dan adab dengan berdasar pada risalah yang lengkap.<sup>44</sup>

### **C. Akhir Perjuangan Kartosuwirjo**

Pengakuan kedaulatan republik Indonesia dari Belanda membuat keadaan lebih mendesak bagi Soekarno, bagaimana caranya untuk mencari penyelesaian masalah tentang Negara Islam Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Kartosuwirjo. Maka pada bulan Desember 1949 diadakan sebuah usaha untuk membujuk atau menyadarkan Kartosuwirjo supaya dia kembali ke dalam pangkuan Republik. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah RIS yaitu dengan menugaskan Menteri Agama K. H. Masykur yang akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan Kartosuwirjo, namun rencana tersebut gagal karena ia tidak bertemu dengan Kartosuwirjo.

Ketika Mohammad Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri, dia memasukkan persoalan DI/TII dalam program kabinetnya. Awal mula yang

---

<sup>44</sup> H. Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 43.

dijalankannya adalah memecahkan masalah DI/TII dengan jalan damai dengan mengutus beberapa tokoh yang dekat dengan Kartosuwirjo. Pada tanggal 14 Mei 1950, Natsir mengutus Wali Alfatah untuk berangkat ke Priangan menemui Kartosuwirjo. Namun pertemuan itu gagal karena pasukan APRIS di bawah perintah kolonel Nasuhi yang sebelumnya telah membuat perencanaan pertemuan tersebut mengepung sebuah kesatuan TII untuk menjamin keamanan pertemuan tersebut.

Semakin pihak RI mengadakan penumpasan terhadap perjuangan Darul Islam, disitu pula kiranya Allah memberikan pertolongan-Nya terhadap perjuangan suci Kartosuwirjo ini. Dengan “*Kurnia Allah*” pada tanggal 20 Januari 1952, Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwirjo disambut oleh Kahar Muzakkar yang siap menggabungkan diri dalam NII. Dan siap pula menerima tawaran Kartosuwirjo untuk memegang pimpinan Tentara Islam Indonesia. Menyusul kemudian pada tanggal 21 September 1953, Abu Daud Beureueh menyatakan bahwa daerah Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia dan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dan didukung pula oleh Ibnu Hajar dari Kalimantan Barat.<sup>45</sup> Maka dengan demikian bertambah kuatlah kedudukan Negara Islam Indonesia dengan masuknya tokoh besar itu.

Ketika pimpinan Angkatan Bersenjata pada tahun 1958 sedang sibuk dengan penumpasan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi, timbul rencana untuk merevisi doktrin militer yang selama itu dipraktekkan. Hasilnya adalah konsep perang

---

<sup>45</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, 188.

wilayah dengan dasar pemikiran, bahwa tanpa adanya bantuan aktif dari rakyat, pemberontakan tidak akan dapat ditumpas. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan doktrin perang wilayah adalah Pangdam Siliwangi, Ibrahim Aji, yang pernah menjabat sebagai atase militer di Beograd.

Penumpasan dan pengisolasian gerakan Darul Islam dimulai pada pertengahan tahun 1960 di kabupaten Lebak yang termasuk korem Banten, untuk menutup kemungkinan adanya anggota DI yang dapat menyeberang ke Sumatera. Di daerah Banten ini juga untuk pertama kali penduduk setempat diikuti sertakan dalam operasi militer yang mula-mula dinamakan sebagai “Perang Bedok” dan kemudian terkenal sebagai sistem “Pagar Betis”. Tetapi pada mulanya sistem ini kurang berhasil, dan baru setelah keamanan untuk semua partisipan diperbaiki, sistem Pagar Betis merupakan salah satu syarat untuk berhasil dalam peningkatan dan pengisolasian pemberontak, terutama di daerah Banten dan Priangan.<sup>46</sup>

Setelah melalui pertarungan panjang, melelahkan, dan memakan banyak korban, gerakan Darul Islam berhasil dilumpuhkan pemerintah RI. Sebagian anggota Darul Islam menyerah, dan Kartosuwirjo juga berhasil ditangkap pada 4 Juni di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan Gunung Geber. Pada saat ditangkap Kartosuwirjo dalam keadaan sakit parah terbaring di lantai gubuk persembunyiannya. Ketika ditangkap Kartosuwirjo meminta agar dokumen-dokumen tentang Negara Islam Indonesia tidak dihancurkan, dan permintaan itu di kabulkan oleh Suhanda

---

<sup>46</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 187.

sebagai komandan pasukan Republik. Kemudian Kartosuwirjo dibawa ke Majalengka bersama dengan puteranya Darda dan Aceng Kurnia. Kemudian mereka dibawa ke markas Ibrahim Aji dan seterusnya ke Garut. Dan pada tanggal 7 Agustus Kartosuwirjo dibawa dari Bandung ke Jakarta.<sup>47</sup>

Setelah ditangkap Kartosuwirjo dipaksa untuk mencabut proklamasi Negara Islam Indonesia, membatalkan jihad, dan menyatakan menyerah. Ketiga hal ini ditolak oleh Kartosuwirjo. Pemerintah RI kemudian memerintah anak Kartosuwirjo untuk menyusun sebuah perintah harian yang di atasnamakan ayahnya, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Kepada seluruh anggota APNII dan *Jama'atul Mujahidin* di mana pun mereka berada untuk menghentikan tembak menembak dan permusuhan antara APNII dan TNI/APRI dan melaporkan diri kepada pos-pos TNI yang terdekat dengan membawa segala alat perang dan dokumen-dokumen. Segala pertanggung jawab dlahir-bathin dan dunia akhirat yang boelh tumbuh daripada perintah harian ini menjadi pikulan kami selaku Imam-Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII sepenuhnya”.<sup>48</sup>

Setelah kesehatan Kartosuwirjo pulih kembali, mulailah diadakan penyelidikan-penyelidikan dan pemeriksaan untuk dapat mengadili perkara tersangka S. M. Kartosuwirjo. Dia juga diperiksa oleh seorang psikolog dan seorang ahli penafsir tulisan tangan (grafolog). Menurut MAHADPER dalam sidang ketiga pada tanggal 16 Agustus 1962 telah terbukti, bahwa segala daya usaha yang telah

---

<sup>47</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 206.

<sup>48</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 92.

dilakukan selama kurang lebih 13 tahun oleh Kartosuwirjo dengan mendirikan dan memperjuangkan Negara Islam Indonesia itu adalah rencana makar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah, dan pengadilan menyatakan, bahwa perjuangan Kartosuwirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah pemberontakan. Disamping itu, bahwa dia telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengadakan aksi pembunuhan terhadap diri presiden Soekarno. oleh karena itu, ketua sidang mengumunkan keputusan Mahkamah, yaitu hukuman mati atas terdakwa Kartosuwirjo.<sup>49</sup>

Kartosuwirjo mengakui memproklamasikan Negara Islam Indonesia dan melawan TNI dan kekuasaan sah di dalam wilayah Indonesia dengan senjata. Tetapi dia tidak mengakui jika ia memerintah pasukannya untuk membunuh Soekarno.<sup>50</sup> Menurut Kartosuwirjo, perintah pembunuhan itu diibaratkannya ”dongeng dan isapan jempol berbahaya” yang sengaja direkayasa untuk memastikan dirinya dijatuhkan hukuman mati. Kartosuwirjo memberikan analogi tentang “isapan jempol berbahaya” yang benar-benar pernah terjadi dalam sejarah. Hitler, kata Kartosuwirjo, telah memanfaatkan kebakaran gedung Reichstag di Berlin untuk membunuh kaum Yahudi di Jerman. Belanda juga pernah mengasingkan ratusan pejuang ke Boven Digul (Irian Barat) karena dituduh terlibat pemberontakan komunis (1926-1927) padahal mereka tidak ada sangkut pautnya dengan pemberontakan tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 208.

<sup>50</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 203.

<sup>51</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 92.

Selanjutnya Kartosuwirjo menyusun surat wasiat yang terdiri dari empat bagian. Dalam bagian pertama, Kartosuwirjo menerangkan kepada anggota keluarganya untuk tetap bersabar dalam menerima *Qadar* Allah yang pahit itu. Kepada istrinya, Siti Dewi Kalsum, dia berpesan untuk selalu terus menerus membimbing anaknya menjadi putera-puteri Islam yang sejati. Dalam bagian kedua, Kartosuwirjo mengucapkan selamat berpisah kepada eks-*Mujahidin* dan bawahannya. Mereka perlu mengetahui, demikian Kartosuwirjo, bahwa dia hingga saat-saat terakhir bertindak dan berbuat selaku Imam Panglima Tertinggi APNII. Dan dia tidak ragu-ragu, bahwa apa yang dia lakukan bersumberkan perintah-perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan siap menjadi saksi kelak di akhirat. Dalam wasiat itu juga dituliskan, bahwa dia *haqqul yakin* suatu waktu cita-cita Islam yang telah diperjuangkannya akan terlaksana di bumi Indonesia. Walaupun lawannya tetap menantang kedua bagian terakhir wasiatnya, Kartosuwirjo mohon kepada instansi yang berwenang supaya barang-barang milik pribadi diberikan kepada keluarganya. Wasiat terakhirnya yaitu, jika nanti dia mati, supaya dia dikuburkan di tanah miliknya sendiri, yaitu di *suffah* yang terletak di desa Cisitu, kecamatan Malangbong. Kepada pemerintahan RI dia mengajukan permintaan, supaya wasiat-wasiatnya disiarkan lewat pers dan radio. Dari wasiat tersebut tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 208.

Sebelum dieksekusi sekitar awal September, Kartosuwirjo dipertemukan dengan keluarganya. Dalam pertemuan tersebut menurut Tahmid (putera Kartosuwirjo), Kartosuwirjo mengatakan, bahwa kematian adalah keniscayaan, dan dengan cara apapun. Lalu, ia berpesan kepada anak-anak agar menjaga ibunya. Kedua, agar mereka menjadi mukmin dan mujahid yang baik. Ketiga, agar seluruh keluarga tidak jauh-jauh dari Siliwangi. “tidak ada pesan-pesan perjuangan DI/TII” ucapnya.<sup>53</sup>

Pada saat itu, keluarga Kartosuwirjo meminta beberapa hal. Yakni, agar eksekusi mati disaksikan keluarga atau wakil keluarga, kemudian, mayat Kartosuwirjo supaya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Malangbong. Atau bila tidak, keluarga diberitahu di mana jasad Kartosuwirjo dikuburkan supaya bisa berziarah. Tetapi semuanya ditolak oleh MAHADPER. Meski kecewa, tapi keluarga Kartosuwirjo pasrah. Sekitar pukul 14.00 WIB, pertemuan diakhiri. Keluarga kembali ke Bandung via Karawang. Sejak saat itu, mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi.<sup>54</sup>

Kodam Jaya telah memerintahkan untuk melaksanakan keputusan MAHADPER dan menyusun regu tembak yang terdiri dari empat angkatan. Kemudian pada tanggal 4 September di pagi buta, Kartosuwirjo bersama-sama dengan regu penembak dibawa dengan sebuah kapal pendarat kepunyaan Angkatan

---

<sup>53</sup> Irwan Nugroho, dkk, "Fakta Baru Eksekusi Kartosuwirjo", Majalah Detik, (17-23 September 2012), 11.

<sup>54</sup> Ibid., 11

Laut dari pelabuhan Tanjung Priok ke sebuah pulau di teluk Jakarta, di mana hukuman mati dilaksanakan. Pada pukul 5.50, tepat setelah komandan regu tembak memberikan tembakan pengampunan, oleh dokter dikeluarkan Visum et Repertum untuk Kartosuwirjo dan juga di pantai pulau itu jenazah Kartosuwirjo dikebumikan menurut adat Islam.<sup>55</sup>

Hukuman mati terhadap Kartosuwirjo menjadi akhir dari gerakan dan perjuangan Darul Islam di Jawa Barat. Akan tetapi gerakan Darul Islam di daerah lain tidak otomatis padam. Dalam catatan sejarah, komando pusat dan pimpinan pusat Darul Islam diserahkan dan diteruskan oleh Teungku Daud Beureueh yang selama itu memimpin gerakan Darul Islam di Aceh.

Dari perjuangan Kartosuwirjo tersebut, dapat dipahami bahwa Kartosuwirjo ingin membentuk negara yang ideal. Negara ideal adalah negara yang sesuai dengan cita-cita ajaran Islam. Secara empiris, negara ideal ini mengacu kepada Negara Madinah, baik pada masa Nabi maupun pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin, karena di negara Madinah ini ajaran-ajaran Islam dilaksanakan dengan sempurna, terutama dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Hanya saja karena karena kondisi pada masa kini sudah jauh berbeda dengan kondisi pada masa itu, maka format dan sistem kenegaraan yang ideal pada masa kini juga mengacu kepada

---

<sup>55</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 207.

penghargaan nilai-nilai kemanusiaan universal serta kecenderungan dunia modern yang rasional.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Zainul Kamal, dkk, *Islam Negara & Civil Society (Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer)*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 73.